

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**Tahun  
2023**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 – 421812

**P A L U**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 051.2/ 2016/BPKAD/ 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka menyusun laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu Menyusun Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Badan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



BAHRAN, SE., MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19650101 199003 1 044

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR :  
TENTANG  
LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN  
2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 CASCADING KINERJA**

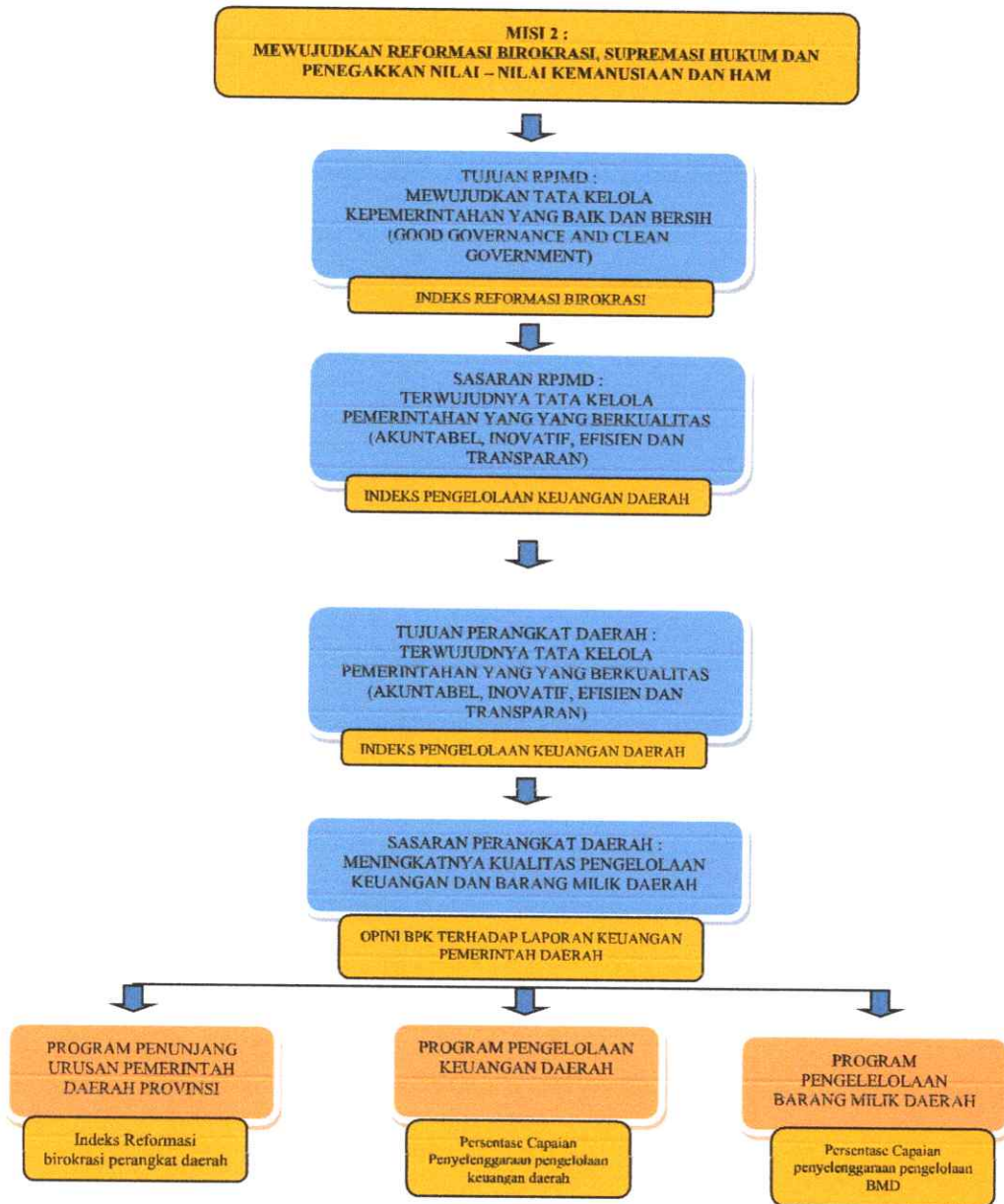
Cascading kinerja adalah menurunkan kinerja secara bertahap dan terbagi habis sampai dengan level paling bawah. Cascading kinerja disusun dengan tujuan agar organisasi mampu menyelaraskan kinerja organisasi terhadap kinerja unit kerja maupun kinerja individu dengan baik, memiliki acuan dalam menilai kinerja organisasi, unit kerja, maupun individu, serta mampu mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efisien dan tepat guna.

Dalam mewujudkan misi Gubernur Tahun 2021-2026, maka BPKAD mengampu misi kedua yaitu mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan tujuan yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan) dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**BAGAN 1.1**  
**CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

INDEKS REFORMASI BIROKRASI BPKAD

KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Nilai SIKIP Perangkat Daerah		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persetase Realisasi Anggaran		KEGIATAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH		KEGIATAN ADMINISTRASI UPTUM PERANGKAT DAERAH		KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERANGKAT DAERAH		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH	
6 (Enam) Sub Kegiatan		8 (Delapan) Sub Kegiatan		4 (Empat) Sub Kegiatan		5 (Lima) Sub Kegiatan		4 (Empat) Sub Kegiatan		2 (Dua) Sub Kegiatan		4 (Empat) Sub Kegiatan	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
Penyusunan Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat di setiap Perangkat Daerah	Penyusunan dan Pelaksanaan ASN	Jumlah Orang yang Dipertanggungjawabkan	Pengelolaan Penerimaan Asli Daerah	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat di setiap Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Pelaksanaan ASN	Jumlah Orang yang Dipertanggungjawabkan	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat di setiap Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Pelaksanaan ASN	Jumlah Orang yang Dipertanggungjawabkan	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat di setiap Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Pelaksanaan ASN	Jumlah Orang yang Dipertanggungjawabkan	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran





## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

### 1. Kepala Badan

1. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset



yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan, dan Pengelolaan Aset Daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

## **2. Sekretaris**

1. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Badan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
  - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
  - g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh  
1 (Satu) Sub Bagian yaitu :

**(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
2. Uraian tugas Sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
  - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
  - e. melaksanakan/ menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP;
  - f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum;
  - g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
  - h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
  - i. melaksanakan/ mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
  - j. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
  - k. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan

n. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

### **3. Bidang Anggaran**

1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan di bidang Penyusunan Anggaran, Manajemen Anggaran, dan Evaluasi APBD;
  - d. pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran pembiayaan, dan pengelolaan anggaran belanja daerah;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota;
  - f. penyiapan bahan dan hasil pengelolaan anggaran daerah;
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

#### **(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran**

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Penyusunan Anggaran.
2. Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Penyusunan Anggaran dengan unit kerja/instansi terkait;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan rencana Penyusunan Anggaran;
- e. melaksanakan sosialisasi terhadap pedoman dan petunjuk teknis terkait penyusunan anggaran terhadap seluruh Perangkat Daerah serta terhadap Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta pengantar nota keuangan;
- g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas pada Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran.

**(2) Sub Bidang Manajemen Anggaran**

1. Sub Bidang Manajemen Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Manajemen Anggaran.
2. Uraian tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Manajemen Anggaran;
  - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Manajemen Anggaran;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Manajemen Anggaran terhadap Rancangan APBD dan

- Rancangan perubahan APBD bersama-sama dengan DPRD Provinsi;
- d. melaksanakan penelaahan serta penganalisaan data dalam rangka mempersiapkan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah serta menyiapkan data terkait dengan penyusunan DPA Lanjutan;
  - f. menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah serta investasi pemerintah daerah;
  - g. melaksanakan penelitian RKA Perangkat Daerah dan DPA Perangkat Daerah;
  - h. melakukan analisa serta Menyusun Bahan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - i. melaksanakan menyiapkan data lainnya guna keperluan Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - j. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Manajemen Anggaran.

#### **4. Bidang Akuntansi**

1. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen dan Evaluasi Pertanggungjawaban.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang

- Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan, Akuntansi Manajemen, dan Evaluasi Pertanggungjawaban;
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - f. penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Akuntansi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

**(1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.
2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan serta pengembangan pelaksanaan Akuntansi Pelaporan;
  - d. menyusun rancangan perubahan kebijakan akuntansi pemerintah Daerah, Rancangan perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah serta rancangan kebijakan lain yang berkaitan dengan penguatan fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta melaksanakan sosialisasi;
  - e. melaksanakan fungsi Akuntansi Pemerintah Daerah baik Pendapatan, Belanja, Hutang, Piutang, Investasi dan lainnya atas Pelaksanaan APBD setiap bulan;
  - f. melaksanakan rekonsiliasi dan atas semua bahan/ data yang terkait dengan akun Laporan Keuangan dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebelum

Penyusunan Laporan;

- g. melaksanakan penyusunan Laporan bulanan, triwulanan, Semesteran dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap akhir tahun;
- h. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pada lembaga Daerah yang melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan Sistem Prosedur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- i. melaksanakan pendampingan pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan hasil koreksi audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan pembinaan akuntansi dan pelaporan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

**(2) Sub Bidang Akuntansi Manajemen**

1. Sub Bidang Akuntansi Manajemen mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Akuntansi Manajemen.
2. Uraian tugas Sub Bidang Akuntansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Akuntansi Manajemen;
  - c. melaksanakan peyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan Pelaksanaan Akuntansi Manajemen

- serta Pelaksanaan APBD Provinsi bersama dengan DPRD;
- d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan bendahara penerimaan termasuk bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran termasuk bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - e. melaksanakan penyiapan data pembukuan Bendahara baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran termasuk Badan Layanan Umum Daerah secara berkala sebagai bahan Penyusunan Laporan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan meminta Laporan Keuangan setiap akhir tahun sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - g. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Kepegawaian, pembayaran gaji serta berkoordinasi dengan BKD, Perangkat Daerah dan Bidang Perbendaharaan;
  - h. melaksanakan Rekonsiliasi dan menyiapkan data Aset tetap dan persediaan secara berkala dan berkoordinasi dengan Bidang Aset sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - i. menyiapkan data capaian kinerja dan indikator Pembangunan, pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah serta lembaga lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - j. melaksanakan monitoring, Evaluasi dan pembinaan tentang Akuntansi Manajemen atas Pelaksanaan APBD di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota;
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
  - l. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Akuntansi Manajemen.



## **5. Bidang Perbendaharaan**

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - e. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, dan penatausahaan pembiayaan daerah;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pengelolaan Kas;
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
  - h. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu:

### **(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung**

1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Belanja Tidak Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun

- program kerja Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
- b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
  - c. melakukan koordinasi dan pembinaan teknis Belanja Tidak Langsung dengan pihak dan unit kerja/ Instansi terkait;
  - d. melaksanakan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas Belanja Tidak Langsung;
  - e. melakukan administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - f. melakukan administrasi penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
  - g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran belanja berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  - h. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.

**(2) Sub Bidang Belanja Langsung**

1. Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Belanja Langsung.
2. Uraian tugas Sub Bidang Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Belanja langsung;
  - b. menghimpun peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
  - c. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait;
  - d. melakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat Keterangan

- Pemberhentian Pembayaran;
- e. melakukan administrasi dalam rangka kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atas belanja langsung;
  - f. melakukan administrasi penerbitan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D);
  - g. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Permintaan Pencairan dana (SP2D) dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  - h. melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada Sub Bidang Belanja Langsung;
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Belanja Langsung;

**6. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

1. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pengawasan Aset Daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
  - c. pembinaan dan bimbingan teknis serta pelaksanaan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, dan Pembinaan serta Pengendalian Aset Daerah;
  - d. pelaksanaan pengkoordinasian yang terdiri dari penyusunan

kebutuhan barang milik daerah, penetapan status barang milik daerah, pemanfaatan, pemusnahan, pemindah-tanganan dan penghapusan barang milik daerah, pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan penyusunan neraca barang milik daerah, dan pengamanan barang milik daerah;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah, serta Pembinaan dan Pengendalian Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang Pengelolaan Aset Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Aset Daerah dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

**(1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah**

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.
2. Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - b. menghimpun Peraturan Perundangan-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Perencanaan Dan Penatusahaan Aset Daerah dengan pihak dan unit kerja/instansi terkait antara lain penyusunan kebutuhan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah, penetapan status Barang Milik Daerah;
  - d. melaksanakan mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Aset Daerah;
  - e. melaksanakan Proses administrasi penggunaan dan

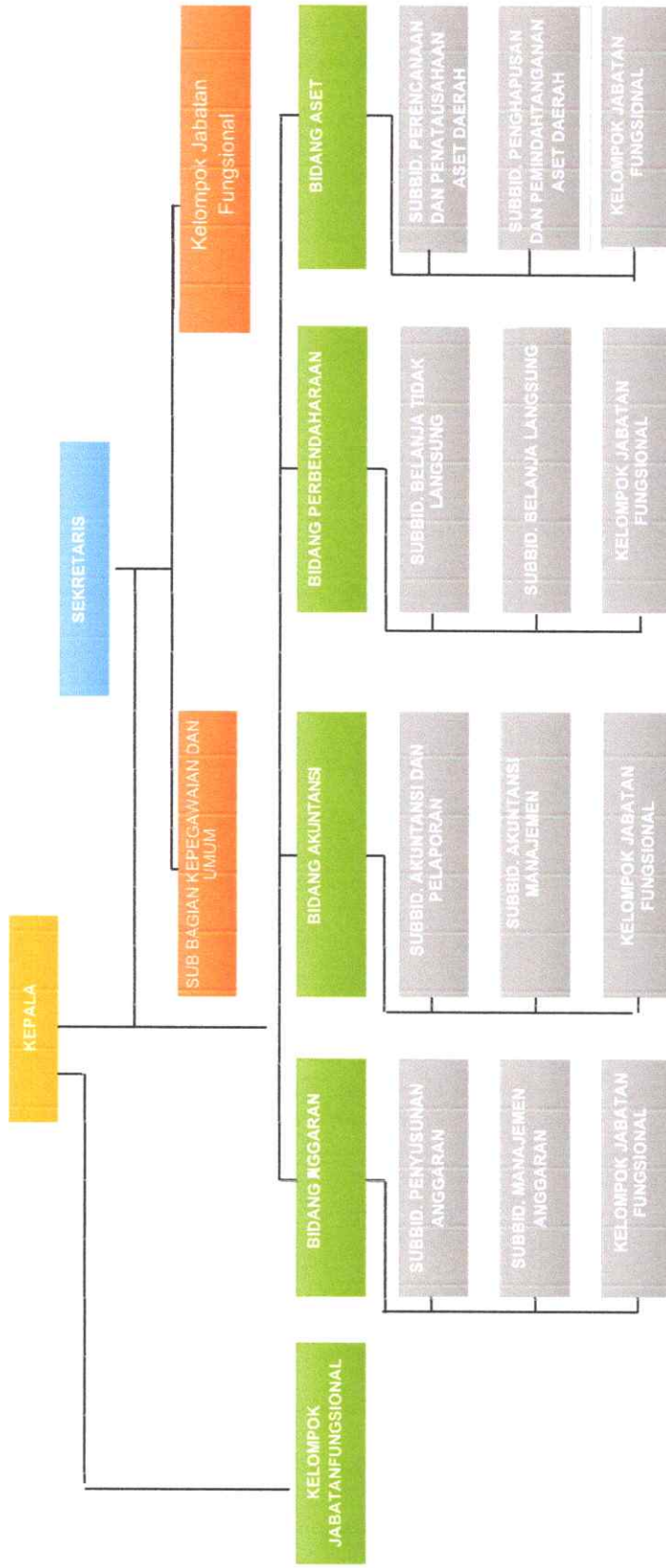
- pemanfaatan Aset Daerah;
- f. melaksanakan pengumpulan, menganalisa, mengevaluasi, dan menyusun Laporan mutasi barang, Laporan persediaan barang, Laporan hasil pengadaan barang dan Laporan hasil pemeliharaan barang;
  - g. melakukan rekonsiliasi data realisasi belanja dalam rangka penyusunan Laporan mutasi barang;
  - h. melakukan bimbingan teknis pada Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - i. melaksanakan pembinaan kabupaten/kota;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tugas Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah.

**(2) Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah**

1. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.
2. Uraian tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penghapusan dan pemindahtanganan asset daerah;
  - c. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
  - d. menghimpun bahan dan data, menganalisa serta menyelenggarakan kegiatan koordinasi penghapusan/ perubahan status hukum Aset Daerah;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan penghapusan dan perubahan status hukum Aset Daerah;
  - f. melakukan Pembinaan Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;

- g. melaksanakan Pembinaan Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah.

**BAGAN 1.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**



### 1.3 ISU-ISU STRATEGIS

Aspek strategis merupakan hal penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Eksistensi sebuah perangkat daerah bergantung sejauh mana perangkat daerah tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon aspek-aspek strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Aspek strategis yang dapat mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
- b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

Selain aspek strategis, dalam mengemban tugas dan menjalankan fungsi pelayanannya, BPKAD dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 1.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi**  
**Sulawesi Tengah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan	Masih terbatasnya pegawai yang memiliki kapabilitas	Perkembangan teknologi, informasi dan aplikasi yang begitu cepat
2	Sarana dan Prasarana kantor yang belum memadai, ruangan kerja terbatas	Sarana dan Prasarana perkantoran yang kurang memadai	Kapasitas Gedung Kantor yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai
3	Percepatan Tindaklanjut atas Hasil temuan pemeriksaan dari BPK RI dan APIP serta penyelesaian temuan kerugian daerah yang masih perlu ditingkatkan	Percepatan tindak lanjut serta penyelesaian hasil temuan pemeriksaan	kurangnya perhatian dari pihak ke tiga, perangkat daerah/ stakeholder untuk menyelesaikan tindak lanjut yang dimaksud
4	Transisi penggunaan aplikasi perencanaan keuangan daerah	Lambatnya proses pengelolaan keuangan daerah	Perubahan Regulasi dan kebijakan
5	Laporan keuangan masing-masing perangkat daerah yang belum akuntabel dan tepat waktu dalam penyajiannya	Penyajian laporan keuangan masing-masing perangkat daerah belum akuntabel dan tepat waktu	Kurangnya pemahaman pengelola laporan keuangan dalam hal Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada masing-masing perangkat daerah



6	Belum terintegrasinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban yang belum terintegrasi	Informasi pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset yang baru dapat dilihat pada masing-masing bidang
7	Belum optimalnya koordinasi pengelolaan BMD dengan Kabupaten/ Kota	Inventarisasi dan pengamanan aset daerah yang tidak efektif	Sinkronisasi dan pengamanan aset yang tidak berjalan dengan baik
8	Inventarisasi dan pengamanan aset tetap belum maksimal	Belum tertibnya pengamanan aset	Dokumen asal usul tanah yang belum lengkap

Sebagaimana esensi tugas BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang bersumber dari sisi eksternal maupun internal. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan pada setiap bidang belum cukup memadai;
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah juga masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi;
3. Peningkatan koordinasi dan tindak lanjut atas hasil temuan Pemeriksaan dari BPK RI dan APIP dalam rangka peningkatan akuntabilitas;
4. Implementasi perubahan regulasi dengan cepat dan tepat;
5. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah dengan kabupaten/kota;
7. Implementasi Akuntansi dan penatausahaan aset berbasis akrual dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); dan
8. Sinkronisasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari perencanaan, penghapusan, penatausahaan aset dan laporan BMD.

#### 1.4 DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

##### 1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 134 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari segi kuantitas dengan jumlah pegawai tersebut cukup memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun dari aspek kualitas dengan tolak ukur pendidikan formal masih perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelasnya mengenai Sumber daya Aparatur dapat dilihat pada Tabel - Tabel berikut :

**TABEL 1.2**  
**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BERDASARKAN GOLONGAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	11 orang	
2.	Golongan III	105 orang	
3.	Golongan II	19 orang	
	JUMLAH	135 orang	

**TABEL 1.3**  
**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Eselon II.a	1 Orang	
2.	Eselon III.a	5 Orang	
3.	Eselon IV.a	9 Orang	
4.	Fungsional	5 Orang	
5.	Fungsional Umum/Pelaksana	115 Orang	
	JUMLAH	135 Orang	

**TABEL 1.4**  
**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SLTA	22 Orang	
2.	Diploma III	2 Orang	
3.	S 1 / D IV	72 Orang	
5.	S 2	39 Orang	
	JUMLAH	135 Orang	

**TABEL 1.5**  
**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-Laki	70 Orang	
2.	Perempuan	65 Orang	
	JUMLAH	135 Orang	

#### 1.4.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang mutlak diperlukan oleh BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Adapun daftar inventaris sarana dan prasarana bagi aparatur BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.6**  
**Daftar Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Keterangan/Kondisi
1	Kendaraan Roda Empat	18	Unit	Baik
2	Sepeda Motor	90	Unit	Baik
3	Kursi Pejabat	12	Buah	Baik

4	Kursi	479	Buah	Baik
5	Meja	80	Buah	Baik
6	Brankas	3	Buah	Baik
7	AC	25	Buah	Baik
8	Lemari	39	Buah	Baik
9	Papan Nama Instansi	3	Buah	Baik
10	Exhause Fan	4	Buah	Baik
11	TV	19	Buah	Baik
12	PC	75	Buah	Baik
13	Leptop	85	Buah	Baik
14	Printer	57	Buah	Baik
15	Scanner	15	Buah	Baik
16	Wireless	1	Buah	Baik
17	CPU	7	Buah	Baik
18	Alat Pengancur Kertas	1	Buah	Baik
19	Dispencer	6	Buah	Baik
20	Alat Degreening Jeruk Kap	1	Buah	Baik
21	Monitor	5	Buah	Baik
22	Server	3	Buah	Baik
23	Pompa Air	1	Buah	Baik
24	Mesin Absensi	3	Buah	Baik
25	Karpet	14	Buah	Baik
26	CCTV	3	Buah	Baik
27	Genset	1	Buah	Baik
28	Alat Kesehatan Olahraga	2	Buah	Baik
29	Peralatan Personal Komputer	2	Buah	Baik
30	Gerobak Dorong	4	Buah	Baik
31	Vakum Cleaner	3	Buah	Baik
32	Loudspeaker	1	Buah	Baik
33	Camera Video	2	Buah	Baik
34	Alat Komunikasi Telephone	12	Buah	Baik
35	Mesin Kompresor	1	Buah	Baik
36	Mesin Bor Tangan	1	Buah	Baik

37	Alat Bengkel Tak Bermesin	1	Buah	Baik
38	Tempat Tidur Kayu	2	Buah	Baik
39	Kasur/Spring Bed	9	Buah	Baik
40	Jam Elektronik	1	Buah	Baik
41	Mesin Pemotong Rumput	2	Buah	Baik
42	Mesin Cuci	1	Buah	Baik
43	Alat Pembersih Lainnya	14	Buah	Baik
44	Kipas Angin	1	Buah	Baik
45	Teko Listrik	1	Buah	Baik
46	Rice Cooker	1	Buah	Baik
47	Tabung Gas	1	Buah	Baik
48	Rak Piring Alumunium	1	Buah	Baik
49	Alat Penyimpan Beras	1	Buah	Baik
50	Blender	1	Buah	Baik
51	Presto Cooker	1	Buah	Baik
52	Alat Hiasan	1	Buah	Baik
53	Gorden	1	Buah	Baik
54	Alat Rumah Tangga	1	Buah	Baik
55	Uninterruptible Power Supply	1	Buah	Baik
56	Gerobak Tarik	1	Buah	Baik
57	Mesin Cuci Kendaraan	1	Buah	Baik
58	Digital Multimeter	1	Buah	Baik
59	Alat Ukur Universal	2	Buah	Baik
60	Filing Cabinet Besi	25	Buah	Baik
61	LCD Projector	3	Buah	Baik
62	Kitchen Set	3	Buah	Baik
63	Alat Dapur	2	Buah	Baik
64	Tangga Aluminium	3	Buah	Baik
65	Kamera Udara	1	Buah	Baik
66	UPS 15 KVA for HUB Station	1	Buah	Baik
67	Camera Digital	2	Buah	Baik
68	Hard Disk	4	Buah	Baik
69	Tablet PC	8	Buah	Baik

70	Peralatan MiniKomputer	6	Buah	Baik
71	Setrika	1	Buah	Baik
72	Alat Pemadam	1	Buah	Baik
73	Rak Besi	43	Buah	Baik
74	Lemari Es	6	Buah	Baik
75	Keyboard	1	Buah	Baik
76	Alat Kantor Lainnya	3	Buah	Baik
77	Meubeleur Lainnya	7	Buah	Baik
78	Sound System	2	Buah	Baik
79	Video Monitor	1	Buah	Baik
80	Telephone Mobile	1	Buah	Baik
81	Alat Peraga Praktek	2	Buah	Baik
82	Alat Pengamanan Sinyal	1	Buah	Baik
83	Tv Monitor	2	Buah	Baik
84	Bangku Tunggu	7	Buah	Baik
85	Sofa	8	Buah	Baik
86	Meja Makan Kayu	1	Buah	Baik
87	Meja Rias	1	Buah	Baik
88	Komputer Unit Lainnya	2	Buah	Baik
89	Komputer Jaringan Lainnya	1	Buah	Baik
90	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	Buah	Baik
91	Rak-Rak Penyimpanan	3	Buah	Baik
92	Layar Film	1	Buah	Baik

### 1.5 TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

**TABEL 1.7**  
**EVALUASI AKIP TAHUN 2022**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Perihal	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 700.1.2.1/262/E-AKIP/PROV/VI/2023, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rekomendasi: 1. Perencanaan: a. Perencanaan Kinerja Harus di Publikasikan Tepat Waktu Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017; b. Perjanjian Kinerja harus dipublikasikan tepat waktu berdasarkan PermenPANRB No 53 Tahun 2014	1. Telah dilakukan publikasi dokumen perencanaan pada website BPKAD 2. Telah dilakukan penilaian kinerja dengan memberikan <i>reward and punishment</i> tapi belum optimal.

	Daerah Tahun 2022	<p>c. Cascading/Pohon Kinerja yang Disusun harus dimanfaatkan dalam Perencanaan Kinerja Instansi berdasarkan Permen PANRB No 89 Tahun 2021.</p> <p>2. Pengukuran Kinerja:</p> <p>a. Memberikan <i>reward and punishment</i> sesuai dengan hasil pengukuran kinerja;</p> <p>b. Memberikan pemahaman kepada semua pegawai agar peduli atas hasil pengukuran kinerja.</p> <p>3. Pelaporan Kinerja:</p> <p>a. Laporan Kinerja yang disusun harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (Permen PANRE No 53 Tahun 2014), sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Laporan Kinerja yang disusun harus di reviu secara berjenjang;</p> <p>c. Laporan Kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional;</p> <p>d. Pemanfaatan informasi Kinerja dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, perbaikan kinerja dan penilaian kinerja.</p> <p>4. Evaluasi Kinerja:</p> <p>a. Melakukan dan Mendokumentasikan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi ;</p> <p>b. Melakukan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan dan digunakan untuk mengendalikan kinerja dan menyusun alternatif perbaikan;</p> <p>c. Hasil evaluasi rencana aksi didokumentasikan, ditindaklanjuti dan dilakukan monitoring secara tertulis.</p>	<p>3. Telah dilakukan pengendalian, pemantauan dan melakukan reviu IKU secara berkala dan melalui laporan capaian kinerja.</p> <p>4. Melakukan evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat mengetahui capaian dan hambatan agar dapat dilakukan perbaikan. Dari pemantauan rencana aksi secara berkala sehingga terdapat informasi yang bisa digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan hambatan agar dapat dibahas bersama sehingga mendapat alternatif penyelesaian masalah serta dilakukan perbaikan dalam penyajian data pada dokumen LAKIP yang membandingkan data kinerja yang memadai realisasi tahun ini dan realisasi tahun sebelumnya.</p>
--	-------------------	---	--

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**, maka ditetapkan 9 Misi Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

- 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan dasar.**
- 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.**
- 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.**
- 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.**
- 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah Yang Merata dan Berkeadilan.**
- 6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.**
- 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawan Maupun di Dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di Luar Provinsi Bertetangga.**
- 8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistematis dan Digital.**
- 9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.**

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan, maka tujuan BPKAD Sulawesi Tengah yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:



**TABEL 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA BPKAD**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	a. Indeks Reformasi Birokrasi b. Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) c. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	62  WTP  B	64  WTP  C	66  WTP  B	68  WTP  B	70,05  WTP  B

## 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan strategi dan kebijakan, antara lain:

### A. Strategi

Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatkan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.

### B. Kebijakan

Arah kebijakan yang dirumuskan didalam pencapaian visi misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut ;

1. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah.

2. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah
3. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi barang milik daerah
4. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.2**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju.</b>			
<b>MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	1. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	1. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah. 2. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah
		2. Meningkatkan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	1. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi barang milik daerah 2. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah.

Untuk lebih jelasnya, rencana kinerja BPKAD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.3**  
**RENCANA KINERJA TAHUN 2023**

<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA PADA TAHUN 2023</b>
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	a. Indeks Reformasi Birokrasi	64
b. Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			C	
c. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah			WTP	

### **2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang didanai dari APBD terdiri 3 Program, 13 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan.

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Langsung Pencapaian Sasaran**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah</li> <li>-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</li> <li>- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD</li> <li>- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</li> <li>- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</li> </ul>	Rp 694.362.979.095	Rp 783.886.934.459	Bertambah
			Rp 4.748.835.150	Rp 5.819.257.225	Bertambah
			Rp 790.235.225	Rp 1.017.398.450	Bertambah
			Rp 233.392.000	Rp 286.911.775	Bertambah
			Rp 480.060.000	Rp 453.550.000	Berkurang
			Rp 177.750.000	Rp 117.550.000	Berkurang
			Rp 212.347.550	Rp 174.524.650	Berkurang
			Rp 159.970.125	Rp 135.135.025	Berkurang
			Rp 1.818.290.125	Rp 2.263.870.925	Bertambah
			Rp 284.632.000	Rp 650.335.000	Bertambah

	- Pembinaan, Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Rp	592.158.125	Rp	719.981.400	Bertambah
	- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	830.433.850	Rp	1.183.303.875	Bertambah
	- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Rp	403.445.000	Rp	637.120.700	Bertambah
	- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Rp	426.988.850	Rp	546.183.175	Bertambah
	- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp	3.866.602.505	Rp	4.817.368.065	Bertambah
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp	344.800.000	Rp	523.466.550	Bertambah
	- Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp	485.319.850	Rp	726.596.260	Bertambah
	- Penatausahaan Pembayaan Daerah	Rp	631.829.155	Rp	856.836.755	Bertambah
	- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp	249.530.000	Rp	394.445.000	Bertambah
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Ailran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	289.273.500	Rp	305.023.500	Bertambah

			Rp	244.960.000	Rp	283.615.000	Bertambah
		- Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Uang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					
		- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp	841.150.000	Rp	881.625.000	Bertambah
		- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp	779.740.000	Rp	845.760.000	Bertambah
		- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp	3.557.592.743	Rp	4.568.083.018	Bertambah
		- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rp	774.503.725	Rp	833.385.000	Bertambah
		- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	964.973.851	Rp	1.198.919.026	Bertambah
		- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp	929.930.300	Rp	1.277.058.750	Bertambah
		- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	888.174.867	Rp	1.258.720.242	Bertambah

			<b>Rp 681.359.524.847</b>	<b>Rp 767.498.922.276</b>	<b>Bertambah</b>
	- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp 179.958.300	Rp 164.958.300	Berkurang	
	- Penyusunan Kebijakan Alokasi Subsidi	Rp 681.179.566.547	Rp 767.333.963.976	Bertambah	
	- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Rp 5.304.807.257</b>	<b>Rp 4.913.139.451</b>	<b>Berkurang</b>	
	- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<b>Rp 5.304.807.257</b>	<b>Rp 4.913.139.451</b>	<b>Berkurang</b>	
	- Penyusunan Standar Harga	Rp 257.079.623	Rp 257.079.623	Sama	
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Sama	
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 1.288.009.434	Rp 963.735.878	Berkurang	
	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 718.917.150	Rp 718.917.150	Sama	
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 994.052.200	Rp 994.052.200	Sama	
	- Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 671.619.150	Rp 671.619.150	Sama	
	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 291.575.500	Rp 291.575.500	Sama	
	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 205.150.000	Rp 355.274.500	Bertambah	
	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 131.905.500	Rp 131.905.500	Sama	
	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 220.836.850	Rp 220.836.850	Sama	
	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 325.661.850	Rp 108.143.100	Berkurang	

**Tabel 2.5**  
**Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran**  
**Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang
1	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 435.628.629.325	Rp 296.701.752.237	Berkurang
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 962.488.321	Rp 1.353.967.250	Bertambah
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 206.704.771	Rp 233.219.700	Bertambah
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 85.358.000	Rp 106.858.000	Bertambah
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 68.150.000	Rp 102.437.000	Bertambah
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 83.950.800	Rp 104.175.800	Bertambah
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 90.850.000	Rp 126.242.000	Bertambah
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 427.474.750	Rp 681.034.750	Bertambah
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 427.426.706.089	Rp 281.896.852.104	Berkurang
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 423.992.784.939	Rp 278.369.302.254	Berkurang
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.227.521.000	Rp 1.949.482.000	Berkurang



- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp	339.154.100	Rp	376.648.100	Bertambah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp	152.450.000	Rp	301.690.000	Bertambah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	108.010.000	Rp	161.401.100	Bertambah
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	479.783.050	Rp	520.163.050	Bertambah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	79.403.000	Rp	127.465.600	Bertambah
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	47.600.000	Rp	90.700.000	Bertambah
<b>- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.187.222.500</b>	<b>Rp</b>	<b>1.705.164.906</b>	<b>Bertambah</b>
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	52.059.000	Rp	376.625.406	Bertambah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	138.908.000	Rp	187.258.000	Bertambah
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	199.947.850	Rp	246.747.850	Bertambah
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	796.307.650	Rp	894.533.650	Bertambah
<b>- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.356.995.175</b>	<b>Rp</b>	<b>1.970.393.479</b>	<b>Bertambah</b>
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp	48.130.061	Rp	77.702.064	Bertambah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	223.336.400	Rp	273.347.700	Bertambah
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	113.515.424	Rp	134.033.691	Bertambah
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	259.846.020	Rp	556.060.065	Bertambah

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	712.167.270	Rp	929.249.959	Bertambah
<b>- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>452.936.313</b>	<b>Rp</b>	<b>3.999.937.414</b>	<b>Bertambah</b>
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	58.930.313	Rp	1.195.097.313	Bertambah
- Pengadaan Mebel	Rp	-	Rp	198.000.000	Bertambah
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp	-	Rp	1.981.559.101	Bertambah
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	394.006.000	Rp	625.281.000	Bertambah
<b>- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.192.734.502</b>	<b>Rp</b>	<b>3.058.515.084</b>	<b>Bertambah</b>
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	1.638.842.741	Rp	2.045.616.177	Bertambah
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	553.891.761	Rp	1.012.898.907	Bertambah
<b>- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.049.546.425</b>	<b>Rp</b>	<b>2.716.922.000</b>	<b>Bertambah</b>
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	650.000.000	Rp	883.500.000	Bertambah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	68.870.000	Rp	68.870.000	Sama
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	1.145.236.425	Rp	1.616.182.000	Bertambah
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	185.440.000	Rp	148.370.000	Berkurang

## 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama pada BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 2.6**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Melakukan Penginputan Dimensi-Dimensi sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020	Berdasarkan Hasil Evaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat
2	Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Berdasarkan Hasil Evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Bidang Akuntansi Bidang Aset
3	Meningkatnya indeks reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Melakukan Penginputan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	Sekretariat

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Tahun 2023:

**TABEL 2.7**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATRO KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	C
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	c. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Dari hasil pengumpulan data akan dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**TABEL 3.1**  
**SKALA NILAI PERANGKAT KINERJA**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**A. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI**

Capaian kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 3.1.A  
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64	Masih menunggu evaluasi	-	-	-
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	C	Masih menunggu evaluasi	-	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	WTP	BPK

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa dari 3 (tiga) Indikator kinerja belum ada yang dapat diketahui capaian kinerjanya karena pada saat penyusunan laporan ini, Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu Inspektorat Daerah melakukan evaluasi, sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) masih menunggu evaluasi dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah melewati audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

**B. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

Realisasi kinerja untuk tahun 2023 hanya satu yang sudah keluar hasilnya yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi masih menunggu Inspektorat Daerah melakukan evaluasi, sedangkan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) masih menunggu evaluasi dari Badan Strategi Kebijakan

Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi.

Sebagai bahan perbandingan realisasi kinerja dengan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 3.1.B**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BEBERAPA TAHUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021				2022				2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60	64,59	100%	B	62	93,02	100%	AA	62	-	-	-
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B	25,6026	32%	C	B	69,071	100%	B	C	-	-	-
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	WTP	100%	WTP

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja pada Tahun 2021 untuk indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai 64,59 dengan kategori Baik disandingkan dengan tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai 93,02 dengan kategori AA (Istimewa) kenaikan nilai tersebut karena Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menindak lanjuti semua rekomendasi/Saran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian (LHP) PMPRB , Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) juga terjadi Kenaikan tahun 2021 mendapatkan nilai 25,6026 dengan kategori C sedangkan pada 2022 mendapatkan nilai 69,071 dengan Kategori B kenaikan ini terjadi karena BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan, dan indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah untuk Tahun 2021 dan 2022 memperoleh opini WTP sesuai dengan target serta untuk Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI .

**C. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

Membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja 2021 dengan target akhir pada dokumen Rencana Strategis BPKAD Tahun 2021-2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 3.1.C**  
**TABEL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN**  
**TARGET JANGKA MENENGAH DI RENSTRA**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	64,59 (B)	93,02 (AA)	-	70,05	28,43
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	25,6026 (C)	69,071 (B)	-	Baik (B)	43,4684
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hanya Indikator Kinerja Opini BPK-RI terhadap LKPD yang sudah ada hasil penilaiannya selama tiga tahun sedangkan dua Indikator Kinerja lainnya mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 masing menunggu evaluasi dari masing masing Instansi Terkait.

**D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Dalam melakukan evaluasi suatu kinerja bukan hanya melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, akan tetapi evaluasi juga dapat dilakukan terhadap faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat sehingga kegagalan pada suatu kinerja dapat di minimalisir atau pun mendapatkan solusi atas perbaikan kinerja. Berikut ini dijabarkan penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada 3 (tiga) sasaran:

**a. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

Berikut ini dijabarkan penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang



telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

#### 1. Penyebab Peningkatan Kinerja:

Meningkatnya kinerja pada sasaran ini dapat disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, hal ini di buktikan dengan BPKAD telah melakukan berbagai upaya guna mengembangkan kompetensi aparaturnya dengan membuat Kamus Kompetensi sebagai salah satu dasar acuan pengembangan kompetensi, dan BPKAD telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga BPKAD dalam menyusun perencanaan telah menggunakan indikator hasil (*outcome*). Faktor kedua yaitu birokrasi yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, hal ini di buktikan dengan BPKAD dalam melaksanakan tata kelola keuangan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah dan juga berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 10 tahun berturut-turut, serta mewajibkan setiap pegawai negeri sipil melaporkan LHKPN dan LHKASN. Faktor ketiga yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik hal ini dibuktikan dengan telah diterapkan standar pelayanan dan Standar Operasional Prodesur (SOP), dan telah dibuat beberapa aplikasi guna memudahkan bagi penerima layanan pada BPKAD, serta telah dilakukannya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahunnya.

#### 2. Penyebab Penurunan Kinerja

Penurunan kinerja Reformasi Birokrasi dapat disebabkan karena faktor Inkapabilitas ASN dan Mentalitas Silo karena rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKAD, bahkan ada ASN yang bersikap resisten dan tidak memahami tugas dan fungsinya, hal ini diperburuk dengan mentalitas silo.

#### 3. Alternatif Solusi

Dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik, maka BPKAD mengambil alternatif solusi adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penerapan kebijakan pelayanan publik (standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survey

keupasan masyarakat) dengan menerapkan kebijakan pelayanan publik, maka dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- b. melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kanal layanan pengaduan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan pengaduan, maka dapat mengetahui dan meminimalisir kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan;
- c. melaksanakan penerapan digitalisasi pada semua unit kerja dengan melakukan digitalisasi, maka data yang didapatkan lebih akurat serta setiap layanan berjalan dengan efektif;
- d. Melakukan pengembangan kompetensi ASN BPKAD terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)**

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja dapat disebabkan beberapa faktor seperti Transformasi digital dalam pekerjaan yang dapat membantu dalam peningkatan kinerja karena lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD. Transformasi digital itu sendiri sangat penting bagi BPKAD, hal ini dibuktikan dengan tersedianya beberapa aplikasi yang digunakan dalam menunjang tugas dan fungsi BPKAD di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang merupakan inovasi dari BPKAD itu sendiri. Selain itu, sarana dan prasana yang menunjang, sumber daya aparatur serta *reward and punishment* juga merupakan faktor yang menunjang dalam peningkatan kinerja.

2. Penyebab Penurunan Kinerja

Penurunan kinerja dapat juga disebabkan karena sarana prasarana yang kurang memadai, sumber daya aparatur atau kompetensi yang dimiliki BPKAD yang kurang memadai atau kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

3. Alternatif Solusi

Dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik, maka BPKAD mengambil alternatif solusi adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan sarana dan prasarana yang baik maka akan meningkatkan kinerja

- aparatur BPKAD;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara BPKAD terutama dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. Meningkatkan transformasi digital yang dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. Menyusun indikator kinerja yang lebih terukur sehingga lebih mempermudah dalam pengukuran kinerja.

**c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah**

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja dapat disebabkan beberapa faktor seperti penggunaan aplikasi dalam pekerjaan yang dapat membantu dalam peningkatan kinerja karena lebih memudahkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD. Penggunaan aplikasi itu sendiri sangat penting bagi BPKAD, hal ini dibuktikan dengan terdapat aplikasi yang digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, sarana, prasana dan sumber daya aparatur merupakan faktor yang menunjang dalam peningkatan kinerja. Sehingga diharapkan dengan terpenuhinya faktor-faktor di atas dapat meningkatkan kinerja BPKAD di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah seperti dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan tolak ukur dalam pemberian opini BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Apabila pengelolaan keuangan dan barang milik daerahnya berkualitas maka akan diberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan hal ini berhasil dipertahankan BPKAD selama kurun waktu 10 Tahun berhasil mendapatkan opini WTP terhadap LKPD Pemerintah Sulawesi Tengah. Terkait dengan LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya tanggung jawab dari BPKAD itu sendiri melainkan merupakan tanggung jawab dari seluruh perangkat daerah. Tanggungjawab perangkat daerah bukan hanya dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan tetapi dimulai dari penatausahaan keuangan, pengelolaan aset dengan baik sehingga bermuara pada laporan keuangan. Jadi dengan kata lain peningkatan kinerja BPKAD itu

sendiri didukung juga juga dari faktor eksternal yaitu perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

## 2. Penyebab Penurunan Kinerja

Penurunan kinerja dapat juga disebabkan karena sarana prasarana yang kurang memadai, sumber daya aparatur atau kompetensi yang dimiliki Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kurang memadai atau kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Penyebab penurunan kinerja juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dari seluruh perangkat daerah.

## 3. Alternatif Solusi Yang Telah Diambil

Dalam pelaksanaan kinerja yang lebih baik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengambil alternatif solusi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan sarana dan prasarana yang baik maka akan meningkatkan kinerja aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Melakukan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Melakukan inovasi yang dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
4. Melakukan Bimbingan Teknis/ Sosialisasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

## **E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

### **1. EFISIENSI ANGGARAN**

Efisiensi sumber daya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 terhadap penyerapan anggaran belanja dalam mengukur capaian kinerja sehingga pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah bisa tercapai dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 3.1.E**  
**EFISIENSI SUMBER DAYA DAN REALISASI ANGGARAN**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	WTP	WTP	100%	Rp 788.800.073.910	Rp 751.447.742.868	95,26%	4,74%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)	C	Menunggu Evaluasi	-	Rp 788.800.073.910	Rp 751.447.742.868	95,26%	4,74%
3.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64	Menunggu Evaluasi	-	Rp 296.701.752.237	Rp 123.057.232.080	41,48%	58,52%

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat capaian kinerja belum ada, maka hasil pengukuran tingkat efisiensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari sasaran "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah" capaian kinerja mendapatkan Opini WTP dari BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Realisasi penyerapan anggaran sebesar 95.26%.
2. Dari sasaran "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)" capaian kinerja belum ada karena masih menunggu dibukanya sistem aplikasi untuk pengisian dimensi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 95.26%.
3. Dari sasaran "Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah" capaian kinerja belum ada karena masih menunggu inspektorat daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di BPKAD dan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 41.48%.

**F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG  
KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN  
PERNYATAAN KINERJA**

Pada tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 1 Program Penunjang dan 2 Program Prioritas serta 13 Kegiatan dan 69 Sub Kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 3.1.F  
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG  
KEBERHASILAN/KEGAGALAN  
PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Reformasi birokrasi perangkat daerah</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Rahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>3 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
<b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
<b>6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
<b>7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirchabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Presentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Standar</b>
	<b>1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen/ Laporan penyusunan rencana anggaran daerah</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan daerah Tentang Perubahan APBD dan perubahan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi
	<b>2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>
	Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Kepala daerah Tentang Penjabaran APBD kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
	Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota



<b>3</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen/ laporan pengelolaan kabupaten/ kota</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
	Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
	Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
<b>4</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen/ laporan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
<b>5</b>	<b>Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen/ laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah</b>
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Presentase Pengolahan Barang Milik Daerah Sesuai Standar</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya buku/ SK/ Dokumen/ Laporan pengelolaan BMD</b>
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
	Pengamanan barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
	Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindatanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Indikator Kinerjanya sehingga kita dapat mengetahui indikator apa saja yang ingin dicapai.

Sementara untuk Tabel analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

**TABEL 3.2.F**  
**ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi		
					Kinerja	Anggaran	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran	Persentase (%)	100%	Rp 783.886.934.459	100%	Rp 746.868.517.018	100%	95,28%
	-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Manajemen Anggaran Yang Tersusun	Persentase (%)	100%	Rp 5.819.257.225	100%	Rp 5.615.964.979	100%	96,51%
	- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	Rp 1.017.398.450	2	Rp 1.009.382.378	100%	99,21%
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA & PPAS Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	Rp 286.911.775	2	Rp 281.412.339	100%	98,08%
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksana Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40	Rp 453.550.000	40	Rp 450.499.150	100%	99,33%
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40	Rp 117.550.000	40	Rp 116.495.700	100%	99,10%
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40	Rp 174.524.650	40	Rp 174.390.600	100%	99,92%
	- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	40	Rp 135.135.025	40	Rp 135.023.175	100%	99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	4	Rp 2.263.870.925	4	Rp 2.250.386.137	100%	99,40%
	- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	Rp 650.335.000	1	Rp 497.106.900	100%	76,44%
	- Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	96	Rp 719.981.400	96	Rp 701.268.600	100%	97,40%
	- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Dokumen dalam Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%)	100%	Rp 1.183.303.875	100%	Rp 1.172.285.615	100%	99,07%
	- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	13	Rp 637.120.700	13	Rp 631.821.540	100%	99,17%
	- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	13	Rp 546.183.175	13	Rp 540.464.075	100%	98,95%

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Kordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Kas Yang Tersusun	Persentase (%)	100%	Rp 4.817.368.065	100%	Rp 4.792.956.622	100%	99,49%
	- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	Rp 523.466.550	12	Rp 522.462.122	100%	99,81%
	- Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyajian, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	6	Rp 726.596.260	6	Rp 725.089.981	100%	99,79%
	- Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	4	Rp 856.886.755	4	Rp 854.169.435	100%	99,69%
	- Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transferan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	6	Rp 394.445.000	6	Rp 394.388.300	100%	99,97%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan	19	Rp 305.023.500	19	Rp 304.963.500	100%	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	9	Rp 283.615.000	9	Rp 283.565.000	100%	99,98%
	- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	Rp 881.625.000	12	Rp 879.105.000	100%	99,71%
	- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	Rp 845.760.000	1	Rp 829.263.284	100%	98,05%
	- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Pertanggungjawaban Yang Tersusun	Persentase (%)	100%	Rp 4.568.083.018	100%	Rp 4.495.136.097	100%	98,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, LO, dan Beban	Dokumen	390	Rp 833.385.000	390	Rp 831.556.114	100%	99,78%
	- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang Tarkonsolidasi	Laporan	80	Rp 1.198.919.026	80	Rp 1.190.591.888	100%	99,31%
	- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Provinsi	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan	225	Rp 1.277.058.750	225	Rp 1.234.784.591	100%	96,69%
	- Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2	Rp 1.258.720.242	2	Rp 1.238.203.504	100%	98,37%
	- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Belanja Langsung Yang Tersusun	Persentase (%)	100%	Rp 767.498.922.276	100%	Rp 730.792.173.705	100%	95,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	Rp 164.958.300	1	Rp 157.650.000	100%	95,57%
	- Penyusunan Kebijakan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	3	Rp 767.333.963.976	3	Rp 730.694.523.705	100%	95,22%
2.	- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Barang milik Daerah	Persentase (%)	100%	Rp 4.913.139.451	100%	Rp 4.579.225.850	100%	93,20%
	- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengawasan Aset Daerah Yang Tersusun	Persentase (%)	100%	Rp 4.913.139.451	100%	Rp 4.579.225.850	100%	93,20%
	- Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Buku	2	Rp 257.079.623	2	Rp 227.527.150	100%	88,50%
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	SK	8	Rp 200.000.000	8	Rp 174.866.650	100%	87,43%
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	Rp 963.735.878	2	Rp 946.699.000	100%	98,23%
	- Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	Laporan	2	Rp 718.917.150	2	Rp 701.702.450	100%	97,61%
	- Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	Rp 994.052.200	1	Rp 905.119.400	100%	91,05%
	- Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD & Hasil Koordinasi Penilaian BMD	Laporan	2	Rp 671.619.150	2	Rp 600.536.900	100%	89,42%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	- Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertindakannya pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	Rp 291.575.500	2	Rp 260.236.650	100%	89,25%	
	- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tertindakannya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	Rp 355.274.500	2	Rp 327.437.450	100%	92,16%	
	- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tertindakannya Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	Rp 131.905.500	2	Rp 131.585.500	100%	99,76%	
	- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tertindakannya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	Rp 220.836.850	2	Rp 207.702.450	100%	94,05%	
	- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	40	Rp 108.143.100	40	Rp 95.812.250	100%	88,60%	
3.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Keuangan	Nilai Saki	Nilai	75	Rp 296.701.752.237	N/A	Rp 123.057.232.080	N/A	41,48%	
			Persentase Realisasi Anggaran	Persentase (%)	85%					95%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80			81,74		102%	
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	21	Rp 1.353.967.250	21	Rp 1.278.134.416	100%	94,40%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	Rp 233.219.700	3	Rp 215.118.151	100%	92,24%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 106.858.000	1	Rp 104.122.400	100%	97,44%
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	Rp 102.437.000	1	Rp 87.064.700	100%	84,99%
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 104.175.800	1	Rp 95.911.450	100%	92,07%
	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	Rp 126.242.000	1	Rp 109.604.250	100%	86,82%
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	Rp 681.034.750	14	Rp 666.313.465	100%	97,84%
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	Dokumen	19	Rp 281.896.852.104	19	Rp 109.444.414.342	100%	38,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	137	Rp 278.369.302.254	137	Rp 106.200.394.026	100%	38,15%
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	Rp 1.949.482.000	1	Rp 1.884.790.000	100%	96,68%
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	Rp 376.648.100	1	Rp 349.564.416	100%	92,81%
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	Rp 301.690.000	1	Rp 281.140.000	100%	93,19%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 161.401.100	1	Rp 90.144.000	100%	55,85%
	- Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksa	Dokumen	2	Rp 520.163.050	2	Rp 447.927.400	100%	86,11%
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	Rp 127.465.600	12	Rp 107.968.050	100%	84,70%
	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	Rp 90.700.000	1	Rp 82.486.450	100%	90,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Survey Keputusan Masyarakat (SKM)	Dokumen	1	Rp 1.705.164.906	1	Rp 1.336.539.186	100%	78,38%
	- Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Buah	134	Rp 376.625.406	134	Rp 374.914.000	100%	99,55%
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	Rp 187.258.000	5	Rp 109.451.240	100%	58,45%
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	Rp 246.747.850	200	Rp 118.777.486	100%	48,14%
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang	200	Rp 894.533.650	200	Rp 733.396.460	100%	81,99%
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	Dokumen	1	Rp 1.970.393.479	1	Rp 1.819.421.740	100%	92,34%
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang di Sediakan	Paket	1	Rp 77.702.064	1	Rp 76.890.395	100%	98,96%
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	5	Rp 273.347.700	5	Rp 224.664.100	100%	82,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	Rp 134.033.691	1	Rp 128.577.600	100%	95,93%
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Buah/ Lembar	540/ 130.000	Rp 556.060.065	540/ 130.000	Rp 528.085.050	100%	94,97%
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Rp 929.249.959	1	Rp 861.204.595	100%	92,68%
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	Rp 3.999.937.414	1	Rp 3.757.492.010	100%	93,94%
	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	1	Rp 1.195.097.313	1	Rp 1.182.110.000	100%	98,91%
	- Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Set	1	Rp 198.000.000	1	Rp 196.845.000	100%	99,42%
	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya	Unit	11	Rp 1.981.559.101	11	Rp 1.904.773.000	100%	96,12%
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Rp 625.281.000	1	Rp 473.764.010	100%	75,77%
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	Rp 3.058.515.084	1	Rp 2.881.717.452	100%	94,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Rp 2.045.616.177	1	Rp 1.927.807.120	100%	94,24%
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	Rp 1.012.898.907	1	Rp 953.910.332	100%	94,18%
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	Rp 2.716.922.000	1	Rp 2.539.512.934	100%	93,47%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	Unit	13	Rp 883.500.000	13	Rp 874.836.444	100%	99,02%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	13	Rp 68.870.000	13	Rp 53.017.800	100%	76,98%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	Rp 1.616.182.000	3	Rp 1.523.406.991	100%	94,26%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	Rp 148.370.000	3	Rp 88.251.699	100%	59,48%

## **1. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN TERCAPAI DAN TIDAK TERCAPAI**

### **a. Analisis Penyebab Keberhasilan Tercapai**

Penyebab Keberhasilan Tercapai karena beberapa Faktor yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara;
2. Melaksanakan akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Birokrasi yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam berkerja sehingga tidak terjadi *conflict of interest*;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik hal ini dibuktikan dengan telah diterapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prodesur (SOP), dan telah dibuat beberapa aplikasi guna memudahkan bagi penerima layanan pada BPKAD.

### **b. Analisis Penyebab Keberhasilan Tidak Tercapai**

Penyebab Keberhasilan Tidak Tercapai disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

1. Inkapabilitas Aparatur Sipil Negara;
2. Mentalitas Silo;
3. Rendahnya kompetensi ASN mempersulit pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKAD;
4. Aparatur Sipil Negara yang bersikap resisten dan tidak memahami tugas dan fungsinya.

## **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel maka penggunaan anggaran yang efektif dan efisien perlu dilakukan serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2023, BPKAD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.085.501.826.147 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 874.504.974.948.

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Untuk mengukurnya dapat dilihat berikut ini :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

P = Penyerapan anggaran  
RA = Akumulasi Realisasi Anggaran  
PA = Akumulasi Pagu Anggaran

$$= \frac{874.504.974.948}{1.085.501.826.147} \times 100 \%$$

$$= 80.56 \%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**TABEL 3.2.1  
CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN 2023**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)	Efisiensi
		3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 296.701.752.237	Rp 123.057.232.080	Rp 173.644.520.157	41,48%	58,52%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.353.967.260	Rp 1.278.134.416	Rp 75.832.834	94,40%	5,60%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 233.219.700	Rp 215.118.151	Rp 18.101.549	92,24%	7,76%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 106.858.000	Rp 104.122.400	Rp 2.735.500	97,44%	2,56%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 102.437.000	Rp 87.064.700	Rp 15.372.300	84,99%	15,01%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 104.175.800	Rp 95.911.450	Rp 8.264.350	92,07%	7,93%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 126.242.000	Rp 109.604.250	Rp 16.637.750	86,82%	13,18%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 681.034.750	Rp 666.313.465	Rp 14.721.285	97,84%	2,16%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 281.896.852.104	Rp 109.444.414.342	Rp 172.452.437.762	38,82%	61,18%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 278.369.302.254	Rp 106.200.394.026	Rp 172.168.908.228	38,15%	61,85%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.949.482.000	Rp 1.884.790.000	Rp 64.692.000	96,68%	3,32%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 376.648.100	Rp 349.564.416	Rp 27.083.684	92,81%	7,19%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 301.690.000	Rp 281.140.000	Rp 20.550.000	93,19%	6,81%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 161.401.100	Rp 90.144.000	Rp 71.257.100	55,85%	44,15%

1	2	3	4	5	6	7
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Rp 520.163.050	Rp 447.927.400	Rp 72.235.650	86,11%	13,89%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 127.465.600	Rp 107.968.050	Rp 19.497.550	84,70%	15,30%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 90.700.000	Rp 82.486.450	Rp 8.213.550	90,94%	9,06%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 1.705.164.906</b>	<b>Rp 1.336.539.186</b>	<b>Rp 368.625.720</b>	<b>78,38%</b>	<b>21,62%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 376.625.406	Rp 374.914.000	Rp 1.711.406	99,55%	0,45%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 187.258.000	Rp 109.451.240	Rp 77.806.760	58,45%	41,55%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 246.747.850	Rp 118.777.486	Rp 127.970.364	48,14%	51,86%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 894.533.650	Rp 733.396.460	Rp 161.137.190	81,99%	18,01%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 1.970.393.479</b>	<b>Rp 1.819.421.740</b>	<b>Rp 150.971.739</b>	<b>92,34%</b>	<b>7,66%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 77.702.064	Rp 76.890.395	Rp 811.669	98,96%	1,04%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 273.347.700	Rp 224.664.100	Rp 48.683.600	82,19%	17,81%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 134.033.691	Rp 128.577.600	Rp 5.456.091	95,93%	4,07%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 556.060.065	Rp 528.085.050	Rp 27.975.015	94,97%	5,03%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 929.249.959	Rp 861.204.595	Rp 68.045.364	92,68%	7,32%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 3.999.937.414</b>	<b>Rp 3.757.492.010</b>	<b>Rp 242.445.404</b>	<b>93,94%</b>	<b>6,06%</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1.195.097.313	Rp 1.182.110.000	Rp 12.987.313	98,91%	1,09%
	Pengadaan Mebel	Rp 198.000.000	Rp 196.845.000	Rp 1.155.000	99,42%	0,58%

1	2	3	4	5	6	7
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Rp 1.981.559.101	Rp 1.904.773.000	Rp 76.786.101	96,12%	3,88%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 625.281.000	Rp 473.764.010	Rp 151.516.990	75,77%	24,23%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 3.058.515.084</b>	<b>Rp 2.881.717.452</b>	<b>Rp 176.797.632</b>	<b>94,22%</b>	<b>5,78%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 2.045.616.177	Rp 1.927.807.120	Rp 117.809.057	94,24%	5,76%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.012.898.907	Rp 953.910.332	Rp 58.988.575	94,18%	5,82%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp 2.716.922.000</b>	<b>Rp 2.539.512.934</b>	<b>Rp 177.409.066</b>	<b>93,47%</b>	<b>6,53%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 883.500.000	Rp 874.836.444	Rp 8.663.556	99,02%	0,98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 68.870.000	Rp 53.017.800	Rp 15.852.200	76,98%	23,02%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.616.182.000	Rp 1.523.406.991	Rp 92.775.009	94,26%	5,74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 148.370.000	Rp 88.251.699	Rp 60.118.301	59,48%	40,52%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Rp 783.886.934.459</b>	<b>Rp 746.868.517.018</b>	<b>Rp 37.018.417.441</b>	<b>95,28%</b>	<b>4,72%</b>
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Rp 5.819.257.225</b>	<b>Rp 5.615.964.979</b>	<b>Rp 203.292.246</b>	<b>96,51%</b>	<b>3,49%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 1.017.398.450	Rp 1.009.382.378	Rp 8.016.072	99,21%	0,79%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 286.911.775	Rp 281.412.339	Rp 5.499.436	98,08%	1,92%

1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 453.550.000	Rp 450.499.150	Rp 3.050.850	99,33%	0,67%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 117.550.000	Rp 116.495.700	Rp 1.054.300	99,10%	0,90%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 174.524.650	Rp 174.390.600	Rp 134.050	99,92%	0,08%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 135.135.025	Rp 135.023.175	Rp 111.850	99,92%	0,08%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 2.263.870.925	Rp 2.250.386.137	Rp 13.484.788	99,40%	0,60%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 650.335.000	Rp 497.106.900	Rp 163.238.100	76,44%	23,56%
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Rp 719.981.400	Rp 701.268.600	Rp 18.712.800	97,40%	2,60%
	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 1.183.303.875</b>	<b>Rp 1.172.285.615</b>	<b>Rp 11.018.260</b>	<b>99,07%</b>	<b>0,93%</b>
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Rp 637.120.700	Rp 631.821.540	Rp 5.299.160	99,17%	0,83%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Rp 546.183.175	Rp 540.464.075	Rp 5.719.100	98,95%	1,05%
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Rp 4.817.368.065</b>	<b>Rp 4.792.956.622</b>	<b>Rp 24.411.443</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,51%</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 523.466.550	Rp 522.462.122	Rp 1.004.428	99,81%	0,19%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 726.596.260	Rp 725.089.981	Rp 1.506.279	99,79%	0,21%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 856.836.755	Rp 854.169.435	Rp 2.667.320	99,69%	0,31%

1	2	3	4	5	6	7
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 394.445.000	Rp 394.338.300	Rp 106.700	99,97%	0,03%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fibak Ketiga (PFK)	Rp 305.023.500	Rp 304.963.500	Rp 60.000	99,98%	0,02%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp 283.615.000	Rp 283.565.000	Rp 50.000	99,98%	0,02%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 881.625.000	Rp 879.105.000	Rp 2.520.000	99,71%	0,29%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp 845.760.000	Rp 829.263.284	Rp 16.496.716	98,05%	1,95%
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp 4.568.083.018</b>	<b>Rp 4.495.136.097</b>	<b>Rp 72.946.921</b>	<b>98,40%</b>	<b>1,60%</b>
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rp 833.385.000	Rp 831.556.114	Rp 1.828.886	99,78%	0,22%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.198.919.026	Rp 1.190.591.888	Rp 8.327.138	99,31%	0,69%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Rp 1.277.058.750	Rp 1.234.784.591	Rp 42.274.159	96,69%	3,31%
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 1.258.720.242	Rp 1.238.203.504	Rp 20.516.738	98,37%	1,63%
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Rp 767.498.922.276</b>	<b>Rp 730.792.173.705</b>	<b>Rp 36.706.748.571</b>	<b>95,22%</b>	<b>4,78%</b>

1	2	3	4	5	6	7
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Rp 164.958.300	Rp 157.650.000	Rp 7.308.300	95,57%	4,43%
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Rp 767.333.963.976	Rp 730.634.523.705	Rp 36.699.440.271	95,22%	4,78%
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Rp 4.913.139.451	Rp 4.579.225.850	Rp 333.913.601	93,20%	6,80%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 4.913.139.451	Rp 4.579.225.850	Rp 333.913.601	93,20%	6,80%
	Penyusunan Standar Harga	Rp 257.079.623	Rp 227.527.150	Rp 29.552.473	88,50%	11,50%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 200.000.000	Rp 174.866.650	Rp 25.133.350	87,43%	12,57%
	Pentatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 963.735.378	Rp 946.699.000	Rp 17.036.378	98,23%	1,77%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 718.917.150	Rp 701.702.450	Rp 17.214.700	97,61%	2,39%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 994.052.200	Rp 905.119.400	Rp 88.932.800	91,05%	8,95%
	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 671.619.150	Rp 600.536.900	Rp 71.082.250	89,42%	10,58%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 291.575.500	Rp 260.236.650	Rp 31.338.850	89,25%	10,75%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 355.274.500	Rp 327.437.450	Rp 27.837.050	92,16%	7,84%
	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 131.905.500	Rp 131.585.500	Rp 320.000	99,76%	0,24%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp 220.836.850	Rp 207.702.450	Rp 13.134.400	94,05%	5,95%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 108.143.100	Rp 95.812.250	Rp 12.330.850	88,60%	11,40%
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.085.501.826.147</b>	<b>Rp 874.504.974.948</b>	<b>Rp 210.996.851.199</b>	<b>80,56%</b>	<b>19,44%</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 1.085.501.826.147 dan yang dapat terealisasi hanya sebesar 874.504.974.948 dengan persentase realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 80,56%. Hal ini disebabkan pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara yang terealisasi hanya sebesar 38,15% dikarenakan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak terealisasi.

### 3.3 INOVASI

Dalam mendukung kinerja BPKAD, BPKAD membuat terobosan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Aplikasi Web E-Monitoring yang bertujuan untuk memonitor dan mengontrol anggaran semua OPD.
2. Aplikasi SIREVA (Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi) yang bertujuan untuk mengoptimalkan Evaluasi pertanggungjawaban RANPERDA dan RANPERKADA APBD Kab/Kota.
3. Website (<https://nogunambara.provsulteng.id>), websiten ini berisi informasi terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat diakses oleh pejabat penatausahaan Barang Milik Daerah OPD, pengurus barang OPD dan pihak lain. Informasi tersebut berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bertujuan memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk memperoleh informasi terkait mekanisme/prosedur pelaksanaan penatausahaan BMD.
4. Modul Digital Pemanfaatan Aset Daerah **"PogunaMbara"** Sulawesi Tengah. Modul ini merupakan panduan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah, yaitu pinjam pakai, sewa BMD, kerjasama pemanfaatan BMD (KSP), bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG), dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI). Modul ini berbentuk digital sehingga lebih mudah untuk diperoleh, paperless, dan dapat dipelajari/dipedomani kapan saja, dimana saja (modul dapat diakses di <https://nogunambara.provsulteng.id>). Judul modul ini diambil dari kaili ledo dengan tujuan mengangkat nilai kearifan local sehingga aneka ragam budaya yang kita miliki dapat dijaga dan dilestarikan bersama. **"PogunaMbara"** (Harta yang melimpah ruah) merupakan akronim dan Popatotosi Noguna Ntoto Mbara. Mbara (pedoman pemanfaatan barang) sehingga modul ini

akan jadi lebih familiar ditelinga warga Sulawesi Tengah.

5. Aplikasi E-SPM (Elektornik SPM) yang memiliki fungsi sebagai sistem informasi didalam mengelola dan memverifikasi dokumen SPM secara digital. Aplikasi E-SPM dapat diakses melalui Web Application dan Android. Aplikasi tersebut bertujuan mengelola dan menyimpan data transaksi SPM, memproses data menjadi lebih muda dan efisien, melakukan kontrol secara tepat terhadap dokumen SPM yang akan dicairkan, menghemat biaya dan juga waktu terhadap kinerja OPD serta penyajian data yang sistematis dan akurat.
6. Aplikasi SADAV merupakan aplikasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi APBD Kabupaten/ Kota
7. Aplikasi SIPANDA (Sistem Informasi Penghapusan Barang Milik Daerah) merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka percepatan proses penghapusan secara online dengan website sipanda.sultengprov.go.id
8. Aplikasi SIMPAN (Simpan Informasi Persediaan) merupakan Sistem yang dibangun agar OPD menginput persediaan barang yang ada di OPD
9. E-REK BOS (Elektronik Rekonsiliasi Bantuan Operasional Sekolah) merupakan system yang dibangun untuk proses rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja dana bos
10. E-Real merupakan sistem yang dibangun untuk melakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

#### **3.4 PENGHARGAAN**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendapatkan Penghargaan sebagai berikut:

1. Penghargaan SAKIP AWARD dari Gubernur Sulawesi Tengah diperoleh Tahun 2023 karena dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD mendapatkan Nilai 85,65 dari nilai maksimum 100 dengan kategori A.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023. Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan dan aset daerah. Penyusunan Laporan kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/ pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Pada Tahun 2023 ini, realisasi anggaran BPKAD mencapai 80,56% sedangkan untuk capaian realisasi kinerja ada dua yang belum dapat diukur karena masih menunggu evaluasi dari inspektorat provinsi untuk indikator indeks reformasi birokrasi, dan untuk indikator indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) menunggu dibukanya penginputan dimensi-dimensi, dan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

#### **4.2. RENCANA TINDAKLANJUT**

Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja, maka BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan :

1. Transformasi digital dalam semua layanan sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan diklat dan bimtek;
3. Perbaikan sarana dan prasarana kantor guna menunjang kinerja pegawai;
4. Pemberian *reward and punishment* bagi pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja.